

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2021). Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance. *Solusi*, 19.
- Akhmad Syakir Kurnia. (2006). Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). *Ekonomi Pembangunan*, 11, 1–20.
- Amerieska, S., Setiati, F., & Mulyono, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2), 53–65.
- Rencana Strategis 2017-2021 BPPKAD Wonosobo, (2017).
- Fahrianta, R. Y., & Carolina, V. (2012). Analisis efisiensi anggaran belanja dinas pendidikan kabupaten kapuas. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 57–72.
- Hajaroh, M., Studi, P., Pendidikan, K., Yogyakarta, U. N., Teori, P., Evaluasi, P., & Kebijakan, E. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42.
- Huhnafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. *Managemen*, 1(1), 66.
- Hidayaturrahman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T. N., Sugiantiningsih, A. A. P., Yahya, Agusrianto, E., & Handayani, E. (2020). Teori Sosial Empirik. In *Teori Sosial dan Administrasi Publik pertemuan 14 dan 15* (Issue May). Edulitera (Anggota IKAPI).
- Jafarov, E., & Gunnarsson, V. (2008). *Government Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Options; by Etibar Jafarov and Victoria Gunnarsson; IMF Working Paper 08/136; May 1, 2008.*
- Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Ilmiah*, 16(1), 34–42.
- Mahirah. (2017). Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa). *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 257–267.
- Muhajir, I. (2019). Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 1.

- Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Kebutuhan, Pemeliharaan dan Penganggaran Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonosobo
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 52 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 1–9.
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 28–38.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.
- Widi. (2014). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas (ROA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO). *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(Ecodemica september 2014), 258–271.
- Zaenal Abidin, & Endri. (2009). Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 21–29.